



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bidang komunikasi dan informatika di era digital ini sangatlah penting, kehadirannya dalam bentuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Rencana pembangunan jangka panjang Indonesia tentunya mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, yang juga berisikan penciptaan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik.

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kota Bandung juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK kota juga dilakukan dalam rangka mewujudkan misi kedua Pemerintah Kota Bandung yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani

Paradigma tersebut sangat terasa dalam pola komunikasi masyarakat antara lain ditandai dengan semakin terbukanya akses komunikasi dan informasi. Keterbukaan yang ditunjang oleh perkembangan teknologi itu mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut meningkat pesat. Keinginan untuk serba terbuka dan transparan menjadi sebuah trend yang harus disikapi secara positif oleh pemerintah.

Disisi pemerintah sendiri, suatu perubahan terjadi disaat mulai dicanangkannya sistem desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah menjadi hal yang serius dihadapi setiap pemerintah daerah, sebagai akses dari paradigma baru yang berkembang. Paradigma tersebut disikapi oleh pemerintah pusat dengan memberikan kebebasan penuh kepada setiap daerah untuk mengurus dirinya sendiri dengan lebih memperhatikan kebutuhan lokal yang tidak lagi disamaratakan secara nasional.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Masyarakat urban merupakan sebuah sistem kompleks dimana aktor-aktor penyusunnya yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi. Lahir dan berkembangnya pusat-pusat masyarakat yang bersifat urban akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumberdaya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tangan lainnya.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu

strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi dan informatika sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi dan informatika yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat.

Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis Smart City telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan Smart City tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dengan melalui visinya **"TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS"**, sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2018-2023.

Atas dasar itulah Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan urusannya yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah :

- 1.2.1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 1.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 1.2.3 Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- 1.2.4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

- 1.2.5 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 199 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- 1.2.6 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2018-2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 tahun yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan penyusunan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung (RPJMD 2018-2023).
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah / kebijakan tugas -tugas sesuai dengan

kewenangannya.

4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adapun sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 199 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas pokok, yaitu;

• Tugas Pokok :

Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik .

• Fungsi :

- Merumuskan kebijakan lingkup Komunikasi dan Informatika;
- Pelaksanakan kebijakan lingkup;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup komunikasi dan informatika;
- Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup komunikasi dan informatika; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari;

- a. Kepala Dinas**

- b. Sekretaris, membawahkan :**

- 1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub.Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Program

- c. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan :**

- 1. Seksi Perencanaan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- d. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:**

- 1. Seksi Interkoneksi dan Jaringan;
 - 2. Seksi Manajemen Perangkat Perangkat Keras Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Publik.

- e. Bidang Data dan Statistik, membawahkan;**

- 1. Seksi Survey dan Akuisisi Data;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Analisa Data;

3. Seksi Publikasi dan Data Terbuka.

f. Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika, membawahkan;

1. Seksi Pengolahan Aplikasi;
2. Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi;
3. Seksi Integrasi Sistem Informasi.

g. Bidang Diseminasi Informasi, membawahkan;

1. Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Seksi Seksi Kemitraan Informasi Masyarakat;
3. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. UPT Radio Sonata

i. Kelompok Jabatan Fungsional

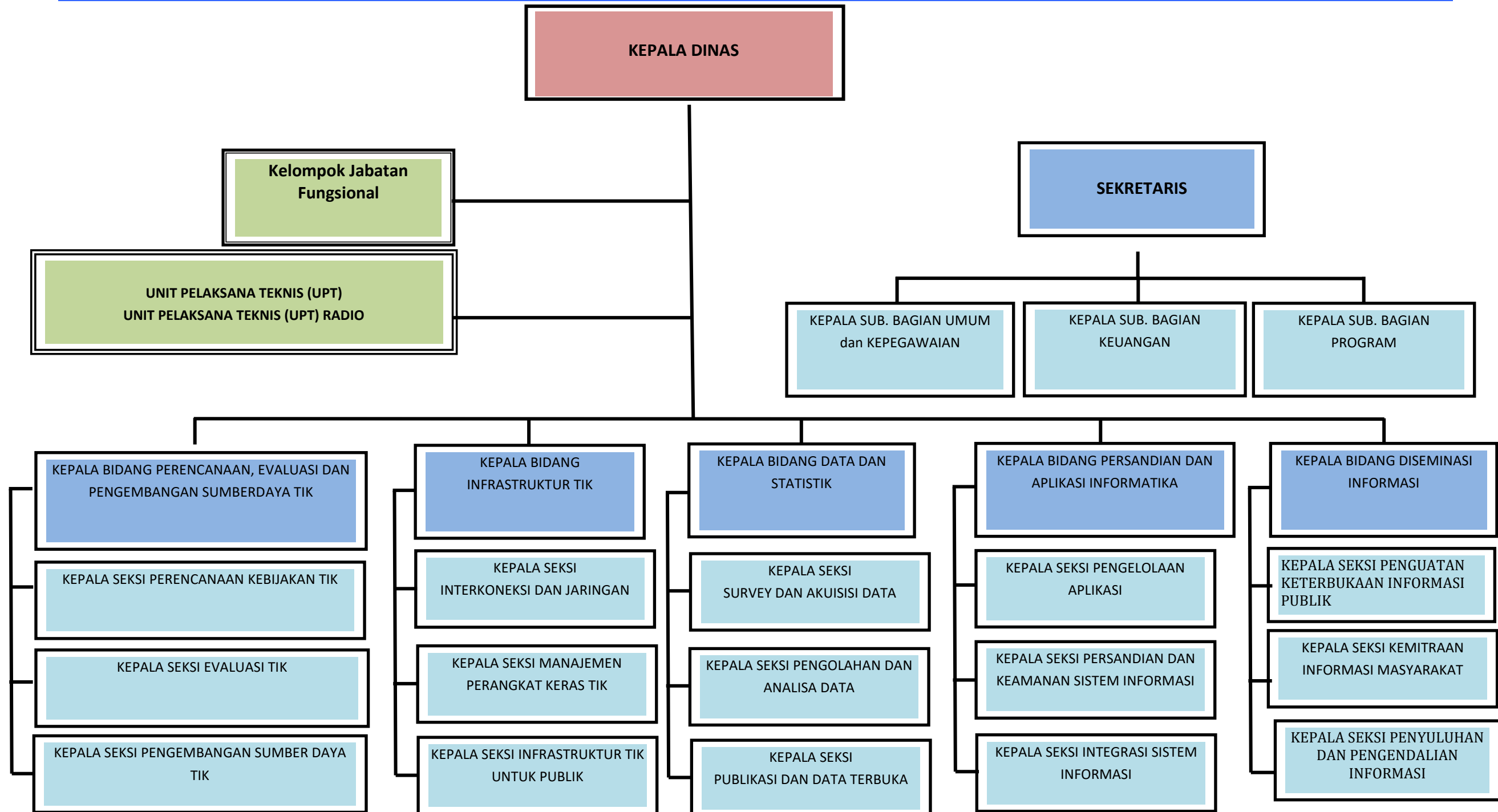
❖ Jumlah Personil Susunan

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2020 memiliki jumlah sebanyak 68 orang PNS, terdiri dari;

- Eselon II b sebanyak 1 orang
- Eselon III a sebanyak 1 orang
- Eselon III b sebanyak 5 orang
- Eselon IV a sebanyak 19 orang
- Eselon IV b sebanyak 1 orang
- Fungsional Umum 39 orang
- Fungsional tertentu 2 orang



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Perwal No. 1393 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung)



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimiliki mencakup;

➤ Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika

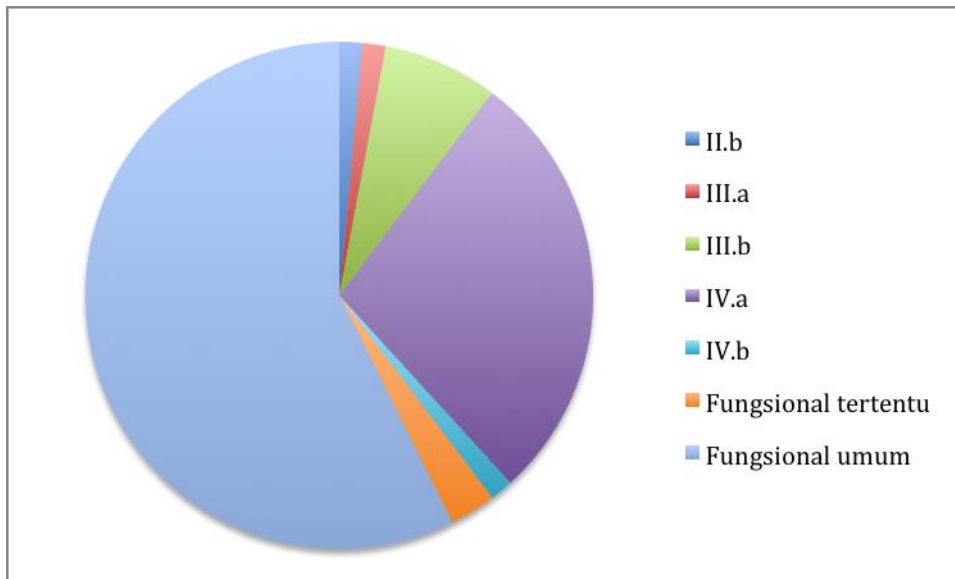
Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 68 orang Pegawai Negeri Sipil. Dari jumlah pegawai sebanyak 68 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 5 orang, Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 19 orang dan Sekretaris UPT (Eselon VI b) sebanyak 1 orang, fungsional umum 39 orang serta fungsional tertentu sebanyak 2 orang.

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

Eselon	Jumlah	Persentase
II.b	1	1.47%
III.a	1	1.47%
III.b	5	7.36%
IV.a	19	27,95%
IV.b	1	1.47%
Fungsional Umum	39	57.36%
Fungsional Tertentu	2	2.95%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambar 1.1
Berdasarkan Eselonering



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

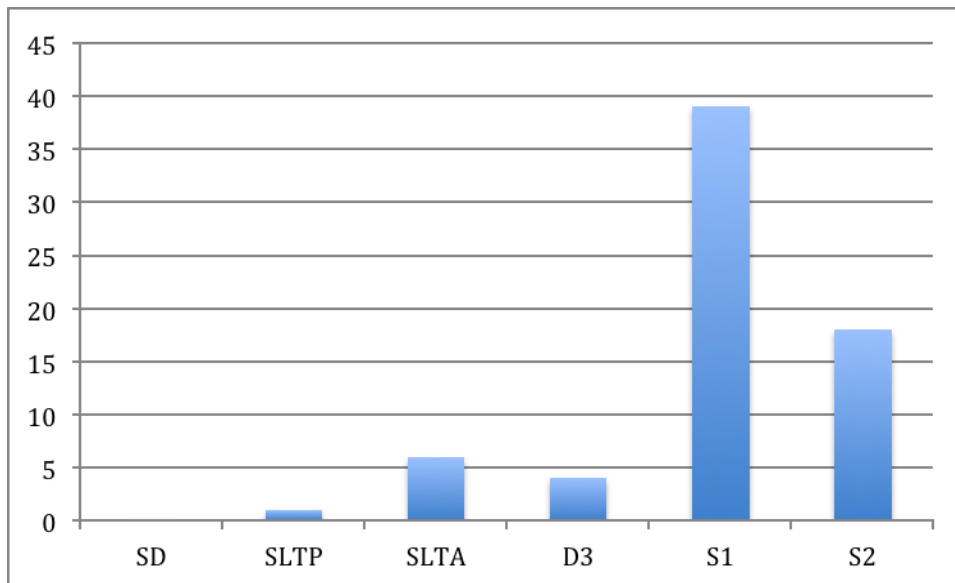
Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan yang dimiliki, dapat di lihat Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan Akhir	Jumlah	Persentase
SD	-	-
SLTP	1	1,47%
SLTA	6	8,83%
D3	4	5,89%
S1	39	57,36%
S2	18	27,47%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambar 1.2
Berdasarkan Pendidikan Akhir



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, sebanyak 18 orang (27,47%) memiliki pendidikan S2, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 39 orang (57,36%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 4 orang (5,71%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 4 orang (5,89%), SLTA sebanyak 6 orang (8,83%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 1 orang (1,47%) dan pegawai yang memiliki pendidikan SD tidak ada.

2.2.2 Sumber daya sarana dan prasarana.

Penunjang lainnya berupa aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan informatika (komputer, kendaraan bermotor roda dua dan empat dan lain-lain), dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan dinas dan jabatan	32
2	Alat Kantor dan rumah (meja, kusri, lemari dll)	2197
3	Alat studio dan alat komunikasi (kamera, proyektor, telephon dll)	696
4	Alat-alat lainnya (CCTV, generator set dll)	62
	JUMLAH	2.987

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, mengacu pada RJPMD Kota Bandung 2018-2023 dan Indikator Kinerja Kunci (PP 6/2008), untuk melihat capaian kinerja pelayanan dapat di lihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 di bawah ini;



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung
Sebelum Perubahan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Integrasi aplikasi layanan Publik dan atau tata kelola pemerintah				NA	NA	NA	7	5	NA	NA	NA	9	5	NA	NA	NA	128,57%	100%
2	Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan sekolah				NA	NA	NA	154	138	NA	NA	NA	168	145	NA	NA	NA	109%	105%
3	Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan koneksi CCTV				NA	NA	NA	102	111	NA	NA	NA	113	123	NA	NA	NA	111%	111%
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi				15%	20%	50%	75%	100%	15%	48,00	17,33			100%	240,00%	30,67		
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center				30%	60%	70%	90%	100%	30%	60,65	62,29			100%	101,08%	88,98		
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi				15%	25%	50%	75%	100%	15%	25,00	60,54			100%	100,00%	121,08		
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100			100%	100,00%	100		
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)				50%	60%	80%	90%	100%	50%	100,00	100			100%	166,67%	135,13		
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				72	73	74	74,5	75	72	76,42	79,78			100%	104,68%	98,49		
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung				62:38	73:27	66:35	70:30	75:25	73:27	93:7	84:16			117,74%	126,02%	101,24		
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika				100%	100%	100%	100%	100%	242,24%	243,89	1454,60			242,24%	243,89%	417,99		
9	Nilai evaluasi LKIP				54	65	70	75	76	54	65,25	93,21			100%	100,38%	133,16		
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100			100%	100,00%	100		
II	Permendagri No. 86 Tahun 2017																		



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Komunikasi dan Informatika		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan	Jumlah KIM/Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kab/kota x 100%	NA	410	450	500	503	NA	410	450	500	503	NA	100%	100%	100%	100%
				Jumlah KIM	NA	123	135	150	151	NA	123	135	150	151	NA	100%	100%	100%	100%
				Jumlah Kecamatan yang ada dalam kab/kota	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Layanan Telekomunikasi		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			Prosentase penduduk yang menggunakan HP/telephon		96,01 (HP)/ 22,5 (Tlp)	96,96 (HP)/ 15,81 (Tlp)	76,71 (HP)/ 11,71 (Tlp)	77,75 (HP)	NA	96,01 (HP)/ 22,5 (Tlp)	96,96 (HP)/ 15,81 (Tlp)	76,71 (HP)/ 11,71 (Tlp)	77,75 (HP)	NA	100%	100%	100%	100%	NA
			Proporsi rumah tangga dengan akses internet		66,15 (ya), 33,85 (tidak), 0 (tdk tahu)	47,38 (ya), 51,12 (tidak), 1,5 (tdk tahu)	49,62 (ya), 49 (tidak), 1,38 (tdk tahu)	57,74	NA	66,15 (ya), 33,85 (tidak), 0 (tdk tahu)	47,38 (ya), 51,12 (tidak), 1,5 (tdk tahu)	49,62 (ya), 49 (tidak), 1,38 (tdk tahu)	57,74	NA	100%	100%	100%	100%	NA
			Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		58,22	42,88	38,31	NA	NA	58,22	42,88	38,31	NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA
	Statistik		Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
			Data Basis Pembangunan Daerah		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Persandian		Prosentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	Jumlah perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah 100% jumlah total Perangkat Daerah	100	100	100	17,46	33,33	100	100	100	17,46	33,33	100%	100%	100%	100%	100%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	63	63	63	11	21	63	63	63	11	21	100%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah total perangkat Daerah	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung
Setelah Perubahan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				NA	NA	2,9	3,0	3,01	NA	NA	2,9	3,11	3,78	NA	NA	100%	104%	125,59%
2	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka				NA	NA	35,00	35	45	NA	NA	35,00	38,16	45,23	NA	NA	100%	109%	100,52%
3	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian yang terkendali				NA	NA	33,33	46,87	62,50	NA	NA	33,33	46,87	62,50	NA	NA	100%	100%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat				NA	NA	73	76	79	NA	NA	73	79,94	84,72	NA	NA	100%	105%	107,24%
5	Persentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi				NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100%	100%	100%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat				NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100%	100%	100%
7	Cakupan layanan informasi masyarakat				NA	NA	60,00	60,00	70,00	NA	NA	60,00	61,04	70,13	NA	NA	100%	101,74%	100,19%
8	Persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang diimplementasikan				NA	NA	50,00	50,00	55,00%	NA	NA	50,00	50,00	57,90	NA	NA	100%	100%	105,28%
9	Website Milik Pemerintah Kota Bandung				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase data informasi yang berkualitas				NA	NA	35,00	35	45	NA	NA	35,00	38,16	45,23	NA	NA	100%	109%	100,52%
13	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government				NA	NA	36,00	36,00	40,00	NA	NA	36,00	36,65	40,20	NA	NA	100%	101,81%	100,50%
14	Cakupan persentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman				NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100%	100%	100%



Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	3.300.066.000	3.300.066.000	3.000.000.000	2.070.000.000	2.185.000.000	-	-	1.905.435.000	2.269.316.840	1.471.345.000	-	-	63,51%	109,63%	67,34%		80,16%
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung																	
- Belanja pegawai	6.937.394.767	12.568.121.547	15.625.898.582,94	15.988.323.455,56	13.548.983.900	6.494.463.591	12.370.234.908	15.167.769.484	14.899.013.029	12.239.722.772	94%	98%	97,06%	93,19%	90,34%		94,52%
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai	4.973.120.000		118.800.000	-	-	3.850.115.000	-	6.600.000	-	-	77%	-	55,5%	-	-		66,25%
- Belanja barang dan jasa	65.299.828.212	31.599.366.772	29.508.373.357	20.818.651.540,24	19.322.899.960	54.773.149.513	27.483.857.945	27.704.689.519	19.023.843.506	16.718.599.277	84%	87%	93,88%	91,38%	86,52%		88,62%
- Belanja modal	10.997.672.000	3.530.612.400	1.797.602.500	2.891.202.352,76	733.909.500	8.491.084.596	2.382.412.050	1.561.685.099,	2.828.236.500	252.131.000	77%	67%	86,87%	97,83%	34,35%		72,61
Total	88.208.014.979	47.698.100.719	47.050.674.439,94	39.698.177.348,56	33.605.793.360	73.608.812.700	42.236.504.903	44.440.744.102	36.751.093.035	29.210.453.049	83%	89%	94,45%	92,58%	86,92%		71,81%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tantangan eksternal yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

- a. Pelaksanaan Bandung Smart City secara eksternal belum didukung maksimal;
- b. Belum semua kinerja pelayanan publik sesuai harapan;
- c. Belum adanya standarisasi aplikasi integrasi;
- d. Tingkat literasi internet belum merata;
- e. Belum optimalnya keamanan data;
- f. Kemampuan Sumber Daya Manusia terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan.

Sedangkan peluang eksternal yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu;

- a. Adanya aturan UU tentang keterbukaan informasi publik;
- b. Adanya konsep smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat;
- c. Kota Bandung yang strategis sebagai pusat kegiatan pendidikan, bisnis dan pusat pemerintahan Jawa Barat;
- d. Meningkatnya jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi serta standarisasi aplikasi di Pemkot Bandung;
- e. Kemudahan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan Instansi Pemerintah lain;
- f. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan serta peran serta masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja pada era globalisasi;
- g. Adanya komitmen pimpinan dan jajaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

- a. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi Bidang Kominfo, Persandian dan Statistik;
- b. Belum optimalnya tim terkait pengembangan Smart City;
- c. Masih rendahnya pemahaman aplikasi dan pengamanan data/informasi;
- d. Belum meratanya jangkauan infrastruktur TIK;
- e. Pemahaman keamanan data belum menjadi prioritas;
- f. Tata kelola TIK masih perlu ditingkatkan
- g. Aplikasi belum terintegrasi.

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang mempunyai

peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu ***Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis.***

Secara harfiah, penjabaran visi yaitu;

Bandung

Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.

Unggul

Dengan pencapaian berbagai prestasi pemerintah Kota Bandung yang diperoleh pada periode sebelumnya, maka ke depan sebagai petahana tidak hanya mempertahankan pencapaian yang telah diraih sebelumnya, namun juga terus berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk sektor yang lain serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan bagi pembangunan Kota Bandung .

Nyaman

Dengan pencapaian kualitas infrastruktur yang sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya, maka sebagai petahana harus menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan agar terpelihara dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

Sejahtera

Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil, dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat kota bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis

Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang merupakan manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah ; manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan serta kokohnya interaksi social, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung.

Misi Kota Bandung yang meliputi :

1. *Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing*
2. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani*
3. *Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan*
4. *Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan*
5. *Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.*

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Bandung serta RPJMD Kota Bandung 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu;

- a. Membangun peningkatan pengetahuan SDM yang mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat khususnya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
- b. Meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikutserta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung
- c. Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Diskominfo merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program.
- d. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi terhadap teknologi informasi sangat mendukung penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015—2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025.

Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki

fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Sesuai dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah

dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, meliputi komunikasi, informatika, persandian dan statistik sektoral berdasarkan asas otonomi, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Dengan semangat itu, maka Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk periode waktu 2018-2023 akan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Berkaitan dengan pelaksanaan visi tersebut perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung misi kepala daerah selama periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa;

2. Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat Yang Sejahtera dan Adil;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- 3.4.1 Berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung berkaitan dengan telahaan RTRW.
- 3.4.2 Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan juga tidak secara langsung berkaitan dengan telahaan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat

dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, hal tersebut sejalan dengan isu-isu strategis ditingkat kota.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam urusan kominfo, statistik dan persandian di Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Isu Strategis dalam Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian di Kota Bandung

NO	URUSAN	ISU STRATEGIS
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Mengoptimalkan pengembangan dan integrasi aplikasi, karena dari 271 aplikasi baru 88 aplikasi yang sudah terintegrasi dengan server

		<p>dari Diskominfo, sehingga masih menjadi tantangan ke depan untuk dapat mengintegrasikan semua aplikasi yang ada untuk menuju <i>smart city</i> level “<i>smart</i>”.</p> <p>2. Meningkatkan keterlibatan/peran perguruan tinggi dan relawan TIK, karena sampai saat ini terdapat 16 orang yang terlibat baik dari perguruan tinggi maupun relawan TIK. Idealnya pada satu kecamatan terdapat satu relawan TIK</p>
2	URUSAN STATISTIK	<p>Mengoptimalkan ketersediaan, akurasi dan validitas data, karena dari 63 perangkat daerah se-Kota Bandung, baru 10% yang mempunyai sistem informasi terstruktur sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dampaknya sinkronisasi data antar perangkat daerah belum optimal.</p>
3	URUSAN PERSANDIAN	<p>1. Meningkatkan keberadaan sandiman yang berkualifikasi, karena sampai saat ini Pemkot Bandung belum memiliki sandiman yang berkualitas.</p> <p>2. Mengoptimalkan keamanan sistem informasi, karena dari 271 aplikasi baru yang diuji terdapat 50 aplikasi yang memiliki keamanan sistem informasi.</p>



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki peran dan strategis dalam urusan komunikasi dan informatika; urusan statistik dan urusan persandian. dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2013.

Sebagai penunjang pembangunan dalam jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab yang besar dalam Misi 2 ” Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani” pada RPJMD 2018-2023, Tujuan RPJMD adalah : Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023, dapat dilihat sebagai berikut;



Tabel 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO DALAM RANGKA PENCAPAIAN
VISI DAN MISI RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023
SEBELUM PERUBAHAN**

NO	VISI (RPJMD)	MISI 2 (RPJMD)	TUJUAN (RPJMD)	INDIKATOR (RPJMD)	SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR (RPJMD)	TUJUAN (PD)	INDIKATOR (PD)	SASARAN (PD)	INDIKATOR (PD)
1	Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Terwujudnya Bandung Smart City	Level Kematangan Smart City	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik /SPBE(Smart City)
							Terwujudnya Bandung Open Data	Prosentase data yang disampaikan kepada masyarakat	Meningkatnya jumlah data yang handal dapat dipertanggungjawabkan/ kredibel	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka
							Terwujudnya Perangkat Daerah yang menggunakan persandian secara optimal	Prosentase jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian	Meningkatnya penggunaan sistem informasi persandian pada perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali
						Prosentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Hasil survai layanan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



Tabel 4.2

**TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO DALAM RANGKA PENCAPAIAN
VISI DAN MISI RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023
SETELAH PERUBAHAN**

NO	VISI (RPJMD)	MISI 2 (RPJMD)	TUJUAN (RPJMD)	INDIKATOR (RPJMD)	SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR (RPJMD)	TUJUAN (PD)	INDIKATOR (PD)	SASARAN (PD)	INDIKATOR (PD)
1	Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Level Kematangan Smart City	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
									Meningkatnya Layanan Bandung Open data	Persentase data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka
									Meningkatnya Keamanan Informasi Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali
				Indeks Reformasi Birokrasi		Prosentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Hasil survai layanan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kota Bandung yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo, seperti yang tergambarakan pada table berikut :

Tabel 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DISKOMINFO KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 – 2023
Sebelum Perubahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Level Pematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	IKU
2	Meningkatnya jumlah data yang handal dapat dipertanggungjawabkan/ kredibel	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	$\frac{\text{Jml Data yang tersedia berdasarkan Permendagri No.86/2017 dan dipublis di portal data}}{\text{Jml data yang seharusnya tersedia pada Permendagri No. 86 Tahun 2017}} \times 100 \%$	IKU
3	Meningkatnya penggunaan sistem informasi persandian pada perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah}}{\text{jumlah total perangkat daerah}} \times 100 \%$	IKU



4	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Berdasarkan hasil survey kepada masyarakat terhadap pelayanan Diskominfo	IKU
---	---	-------------------------------	--	-----

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DISKOMINFO KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 – 2023
Setelah Perubahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Level Pematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	IKU
2	Meningkatnya Layanan Bandung Open Data	Persentase data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	$\frac{\text{Jml Data yang tersedia berdasarkan Permendagri No.86/2017 dan dipublis di portal data}}{\text{Targert data sektoral pada porta data di tahun sebelumnya}} \times 100 \%$	IKU
3	Meningkatnya Keamanan Informasi Persandian	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang telah mendapatkan pengamanan persandian}}{\text{jumlah total perangkat daerah}} \times 100 \%$	IKU
4	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Berdasarkan hasil survey kepada masyarakat terhadap pelayanan Diskominfo	IKU



Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo Kota Bandung tahun 2018-2023, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Diskominfo Kota Bandung setiap tahunnya dalam periode 5 tahun. Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Diskominfo Kota Bandung tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
TARGET TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023
SEBELUM PERUBAHAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja pada awal Periode RPJMD (2018)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Bandung Smart City		Level Kematangan Smart City	Integratif	Integratif	Integratif	Smart	Smart	Smart
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Domain Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,9	3,0	3,01	3,02	3,03	3,04



2	Terwujudnya Bandung Open Data		Prosentase data yang disampaikan kepada masyarakat	25%	35%	45%	55%	65%	75%
		Meningkatnya jumlah data yang handal dapat dipertanggungjawabkan/kredibel	Prosentase data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	25%	35%	45%	55%	65%	75%
3	Terwujudnya Perangkat Daerah yang menggunakan persandian secara optimal		Prosentase jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian	33,33%	46,87%	62,50%	78,12%	93,75%	100%
		Meningkatnya penggunaan sistem informasi persandian pada perangkat daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	33,33%	46,87%	62,50%	78,12%	93,75%	100%
4	Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Diskominfo		Hasil survai layanan Kepuasan Masyarakat	73	76	79	82	85	88,31



		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	73	76	79	82	85	88,31
--	--	---	-------------------------------	----	----	----	----	----	-------

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 4.6
TARGET TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023
SETELAH PERUBAHAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja pada awal Periode RPJMD (2018)	Realisasi		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN		
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Integratif	Integratif	Integratif	B	B	B
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,11	3,72	3,20	3,25	3,30	3,35



		Meningkatnya Layanan Bandung Open Data	Persentase data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	25%	38,16%	45,23%	55%	65%	75%
		Meningkatnya Keamanan informasi persandian	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	33,33%	46,87%	62,50%	78,12%	93,75%	100%
2	Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Diskominfo		Hasil survai layanan Kepuasan Masyarakat	73	79,94	84,72	82	85	88,31
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	73	79,94	84,72	82	85	88,31

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika

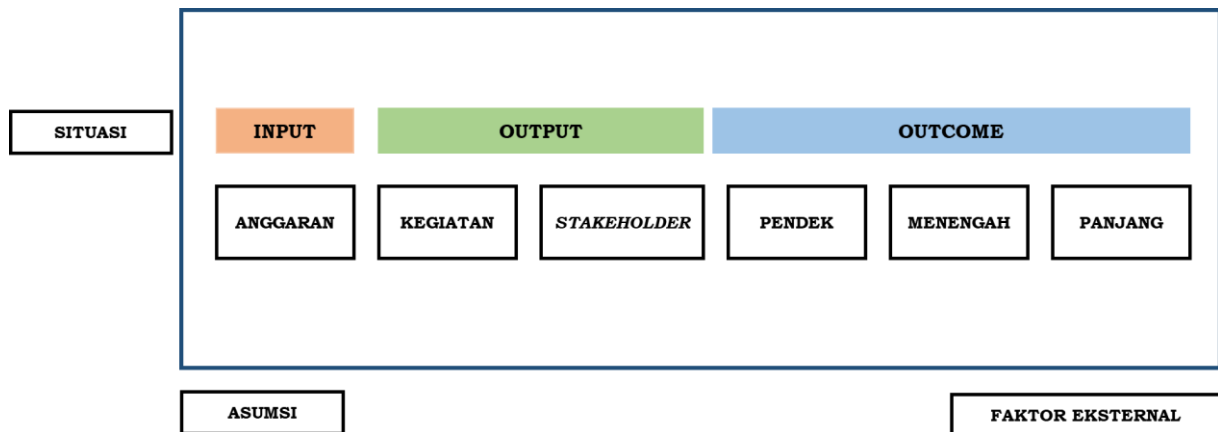
Untuk merumuskan strategi Perangkat Daerah dengan menggunakan alat bantu yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika sebagaimana yang dirumuskan dalam strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023.

Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada Perangkat Daerah. Visualisasi *logic model* dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6.1
Logic Model



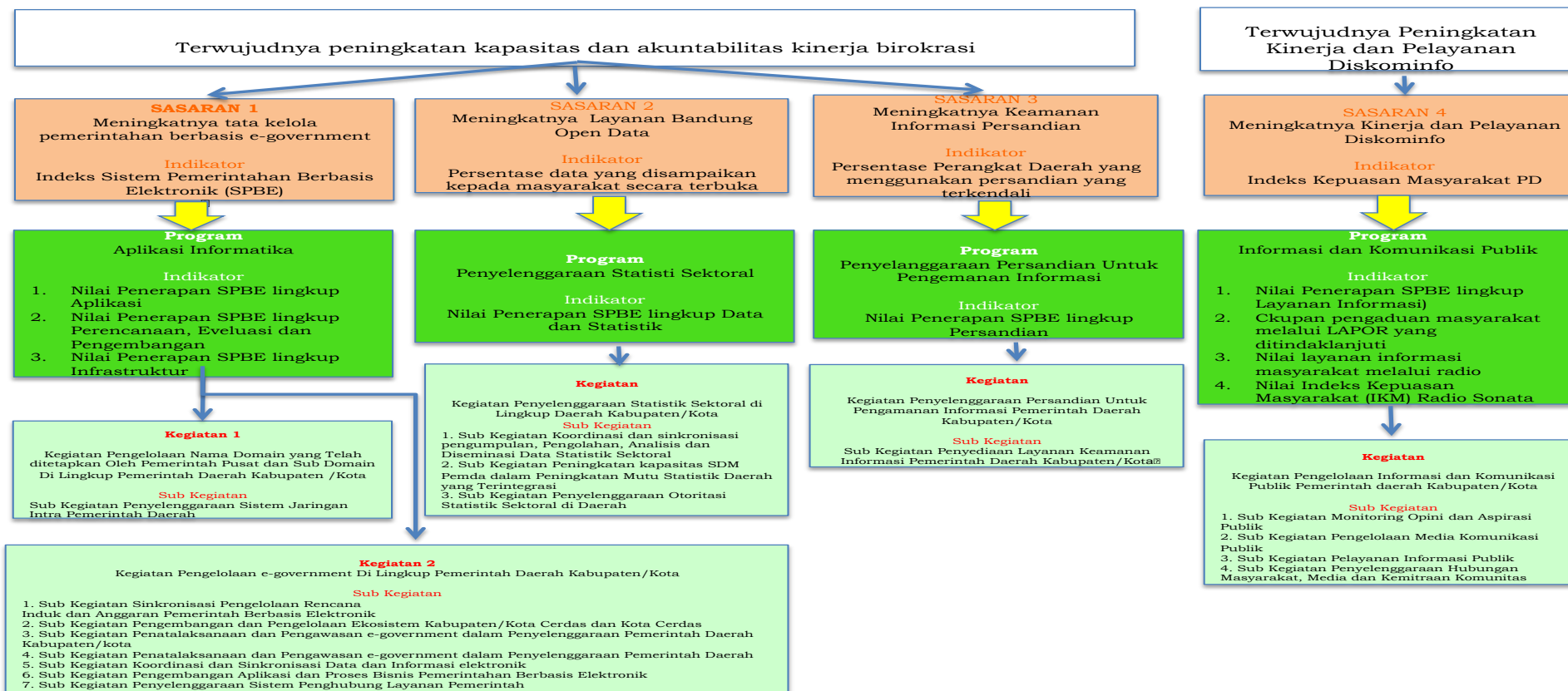
Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Diskominfo. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Diskominfo harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Diskominfo yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bandung secara keseluruhan.

Gambar 6.2

Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Setelah Perubahan)

Pohon Kinerja Pelaksanaan Program Diskominfo Kota Bandung



Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran dan Strategi Diskominfo Kota Bandung

Visi: Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis				
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih				
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Prosentase Perangkat Daerah dengan IKM yang baik	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur
			Nilai evaluasi AKIP kota	Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat
			Nilai LPPD Kota	Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi
			Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
				Meningkatkan kinerja instansi pemerintah
				Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
				Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Domain Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan leveling Bandung Smart City2. Mempercepat pelaksanaan integrasi aplikasi pada perangkat daerah3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet dan jaringan



				<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemanfaatan BCC sebagai kebijakan pimpinan 5. Peningkatan literasi internet 6. Peningkatan perencanaan TIK 7. Peningkatan dan pemerataan Jaringan infrastruktur setiap pengguna 8. Penambahan kapasitas bandwidth
2	Terwujudnya Bandung Open Data	Meningkatnya jumlah data yang handal dapat dipertanggungjawabkan/kredibel	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan system open data 2. Peningkatan wawasan pengelola data di tiap PD
3	Terwujudnya Perangkat Daerah yang menggunakan persandian secara optimal	Meningkatnya penggunaan sistem informasi persandian pada perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	Peningkatan keamanan sistem informasi
4	Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat, PPID dan media lainnya. 2. Pemanfaatan layanan pengaduan Online LAPOR 3. Peningkatan standard kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya

Keterangan:

-  Strategi Pemerintah Kota Bandung
 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika

6.2 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, maka Diskominfo Kota Bandung menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut;

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Diskominfo Kota Bandung

Visi: Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis					
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani					
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Prosentase Perangkat Daerah dengan IKM yang baik	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
			Nilai evaluasi AKIP kota	Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat	
			Nilai LPPD Kota	Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan	
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi	
			Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan	
				Meningkatkan kinerja instansi pemerintah	
				Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	



				Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Domain Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan leveling Bandung Smart City 2. Mempercepat pelaksanaan integrasi aplikasi pada perangkat daerah 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet dan jaringan 4. Pemanfaatan BCC sebagai kebijakan pimpinan 5. Peningkatan literasi internet 6. Peningkatan perencanaan TIK 7. Peningkatan dan pemerataan Jaringan infrastruktur setiap pengguna 8. Penambahan kapasitas bandwidth. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi pelayanan di seluruh instansi melalui integrasi aplikasi 2. Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan 3. Mendorong Perangkat Daerah untuk menggunakan TIK
2	Terwujudnya Bandung Open Data	Meningkatnya jumlah data yang handal dapat dipertanggungjawabkan / kredibel	Prosentase data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan system open data 2. Peningkatan wawasan pengelola data di tiap PD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat standar keamanan data 2. Mengadakan diklat teknis bagi pengelola data PD
3	Terwujudnya Perangkat Daerah yang menggunakan	Meningkatnya	Prosentase Perangkat Daerah yang menggunakan	Peningkatan keamanan sistem informasi	Menghimbau kepada para perangkat daerah

	n persandian secara optimal	penggunaan sistem informasi persandian pada perangkat daerah	persandian yang terkendali		melalui surat edaran untuk menggunakan aplikasi keamanan persandian
4	Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	1 Peningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat, PPID dan media lainnya. 2.Pemanfaatan layanan pengaduan Online LAPOR 3.Peningkatan standard kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya	Memberikan kesempatan SDM Diskominfo untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan bidangnya



Strategi Pemerintah Kota Bandung

Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Dinas komunikasi dan informatika Kota Bandung sesuai dengan pendanaan indikatif, maka ditetapkan kegiatan untuk belanja urusan wajib sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- 1.1 Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 1.2 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi;
- 1.3 Kegiatan Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

- 2.1 Kegiatan Pengendalian dan Pengembangan Infrastruktur Publik;
- 2.2 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur TIK;
- 3.3 Kegiatan Pengendalian dan Pengembangan Perangkat Keras

3. Program Diseminasi Informasi

- 3.1 Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Informasi;
- 3.2 Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
- 3.3 Kegiatan Kemitraan Masyarakat.

4. Program Layanan Informasi Publik

- 4.1 Kegiatan Penyampaian Komunikasi dan Informasi Publik;
- 4.2 Kegiatan Layanan Informasi Program Dinas.

5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- 5.1 Kegiatan Pengolahan dan Analisa Data;
- 5.2 Kegiatan Publikasi dan Data Terbuka;
- 5.3 Kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Data dan Statistik.

6. Program Optimalisasi Aplikasi

- 6.1. Kegiatan Pengelolaan Aplikasi;
- 6.2 Kegiatan Pengelolaan Bandung Command Center;
- 6.3 Kegiatan Integrasi Aplikasi.

7. Program Optimalisasi Persandian

- 7.1 Kegiatan Persandian;
- 7.2 Kegiatan Keamanan Informasi.
- 7.3 Kegiatan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi.

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 8.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 8.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 8.3 Penyediaan alat tulis kantor
- 8.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8.5 Penyediaan peralatan rumah tangga
- 8.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 8.7 Penyediaan makanan dan minuman
- 8.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 8.9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran;
- 8.10 Penyediaan jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Dinas/Operasional.

9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 9.1 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
- 9.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

9.3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

10.1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

11. Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah

11.1 Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi
Perangkat Daerah

Program kegiatan setelah adanya perubahan nomenklatur Kepmendagri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 yang mulai dilaksanakan pada tahun 2021 sampai dengan akhir Tahun 2023, yaitu;

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - h. Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum Daya Air dan Listrik;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Kegiatan Penyampaian Komunikasi dan Informasi Publik
 - a. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

III. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan Nakma Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
 - a Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 - b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi elektronik;
 - d. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;

-
- f. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
 - g. Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Kegiatan Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebelum perubahan, dapat di lihat pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.3, sedangkan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.2 dan Tabel 6.4 di bawah ini;



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Sebelum Perubahan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Terwujudnya Bandung Smart City	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)				2,9	3,0			3,01			3,02			3,03			3,04		Dinas Komunikasi dan Informatika	Bandung
				2	10	24	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan prosentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang diimplementasikan	50%	50%	578.020,600	60%	589.559,654	70%	605.670,363	80%	621.666,867	90%	636.914,514	90%			
				2	10	24	001	Evaluasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	jumlah laporan hasil evaluasi TIK	1 dokumen	1 dokumen	165.150,000	2 dokumen	168.000,000	2 dokumen	175.670,363	2 dokumen	178.666,867	2 dokumen	186.914,514			
				2	10	24	002	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi	Jumlah dokumen pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota Bandung	2 dokumen	1 dokumen	171.389,700	2 dokumen	176.559,654	2 dokumen	180.000,000	2 dokumen	189.000,000	2 dokumen	195.000,000			



				2	10	24	003	Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen perencanaan TIK Pemerintah Kota Bandung	1 dokumen	1 dokumen	241,480,900	2 dokumen	245,000,000	2 dokumen	250,000,000	2 dokumen	254,000,000	2 dokumen	255,000,000			
				2	10	19		Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Capaian prosentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi	100%	100%	12,290,734,328	100%	12,154,735,565	100%	12,468,715,820	100%	12,780,293,123	100%	13,076,113,986	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bandung
				2	10	19	001	Pengendalian dan pengembangan infrastruktur publik	Jumlah data menara telekomunikasi di Kota Bandung	1 dokumen	1 dokumen	448,830,000	1 dokumen	454,735,565	1 dokumen	568,715,820	1 dokumen	580,293,123	1 dokumen	676,113,986			
				2	10	19	002	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur TIK	Jumlah lokasi dilengkapi wifi dan atau CCTV	126 lokasi	154 Lokasi	7,473,004,000	153 Lokasi	7,400,000,000	160 Lokasi	7,500,000,000	167 Lokasi	7,700,000,000	174 Lokasi	7,800,000,000			
								Jumlah interkoneksi antar Perangkat Daerah/Sekolah/kelurahan/puskemas	145 Lokasi	376 Lokasi	380 Lokasi		380 Lokasi		380 Lokasi		380 Lokasi						
				2	10	19	003	Pengendalian dan Pengembangan Perangkat Keras	Jumlah lokasi yang telah menggunakan WAN di Pemerintah Kota Bandung	44 lokasi	54 lokasi	4,368,900,328	72 lokasi	4,300,000,000	124 lokasi	4,400,000,000	218 lokasi	4,500,000,000	224 lokasi	4,600,000,000			
								Jumlah Server yang terintegrasi di Pemerintah Kota Bandung	24 server	28 server	34 server		42 Server		48 server		52 server						
				2	10	23		Diseminasi Informasi	Cakupan layanan informasi masyarakat	60%	60%	2,010,866,124	70%	1,796,011,355	80%	1,846,090,385	90%	1,893,821,505	100%	1,940,271,339	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bandung



				2	10	23	001	Penyuluhan dan Pengendalian Informasi	Jumlah layanan penyuluhan dan pengendalian informasi	15 Dokumen	10 dokumen laporan	231,557,90	10 dokumen laporan	230,000,000	10 dokumen laporan	245,090,38	10 dokumen laporan	265,821,50	10 dokumen laporan	280,271,33			
				2	10	23	002	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan informasi publik	15 Dokumen	15 dokumen laporan	936,278,224	15 dokumen laporan	803,011,355	15 dokumen laporan	825,000,000	15 dokumen laporan	843,000,000	15 Dokumen Laporan	870,000,000			
				2	10	23	003	Kemitraan Informasi Masyarakat	Jumlah sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat, Mitra dan Relawan	6 Dokumen	9 dokumen	843,050,000	9 dokumen	763,000,000	9 dokumen	775,000,000	9 dokumen	785,000,000	9 dokumen	790,000,000			
				2	15	18		Optimalisasi Aplikasi	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	36%	36%	2,054,296,000	40%	1,793,854,592	45%	1,842,874,685	50%	1,891,574,285	55%	1,937,941,340			
				2	15	18	001	Pengelolaan Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikelola	4 Aplikasi	5 Aplikasi	830,000,000	5 Aplikasi	738,854,592	5 Aplikasi	760,874,685	5 Aplikasi	781,547,285	5 Aplikasi	787,941,340			
				2	15	18	002	Pengelolaan Bandung Command Center	Jumlah unit yang dikelola	1 Unit	1 unit	732,501,000	1 unit	680,000,000	1 unit	690,000,000	1 unit	700,000,000	1 Unit	730,000,000			
				2	15	18	003	Integrasi Aplikasi	Jumlah aplikasi yang diintegrasikan	5 Aplikasi	4 Aplikasi	491,795,000	4 Aplikasi	375,000,000	4 Aplikasi	392,000,000	4 Aplikasi	410,000,000	4 Aplikasi	420,000,000			
2	Terwujudnya Bandung Open Data	Meningkatnya jumlah data yang handal dapat dipertanggungjawabkan/kredibel	Prosentase data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	2	14	15		Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Cakupan prosentase data informasi yang berkualitas	35%	35%	1,763,826,465	45%	1,510,349,986	55%	1,551,622,839	65%	1,592,603,118	75%	1,631,664,957	75%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bandung



				2	14	15	007	Pengolahan dan Analisa Data	Jumlah Dashboard Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	364,271,000	2 Dokumen	330,000,000	2 Dokumen	325,000,000	2 Dokumen	330,000,000	2 Dokumen	340,000,000				
				2	14	15	008	Publikasi dan Data Terbuka	Jumlah publikasi data dan infografis	3 Dokumen	3 Dokumen	419,821,477	3 Dokumen	340,349,986	3 Dokumen	346,622,839	3 Dokumen	352,603,118	3 Dokumen	371,664,957				
				2	14	15	009	Pengumpulan dan Penyusunan Data dan Statistik	Jumlah Dokumen/data hasil survey	4 dokumen	4 dokumen	979,733,988	4 dokumen	850,000,000	4 dokumen	880,000,000	4 dokumen	910,000,000	4 dokumen	920,000,000				
3	Terwujudnya Perangkat Daerah yang menggunakan persandian secara optimal	Meningkatnya penggunaan sistem informasi persandian pada perangkat daerah	Prosentase jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian	2	15	19		Optimalisasi Persandian	Cakupan prosentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman	100%	100%	448,949,600	100%	415,468,919	100%	426,822,306	100%	438,095,211	100%	448,840,390	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bandung	
				2	15	19	001	Persandian	Jumlah layanan persandian setiap bulan	12 Bulan	12 bulan	224,993,000												
				2	15	19	002	Keamanan Informasi	Jumlah aplikasi yang diaudit keamanannya	17 PD	10 aplikasi	223,956,600												
				2	15	19		Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi	Jumlah layanan persandian dan aplikasi yang diaudit keamanannya				10 Aplikasi	415,468,919	10 Aplikasi	426,822,306	10 Aplikasi	438,095,211	10 Aplikasi	448,840,390				



				2	10	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan penyediaan ATK bulanan	12 Laporan	12 Laporan	227,373,785	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	177,000,000	12 Laporan	190,222,003	12 Laporan	197,118,378			
				2	10	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan	12 Laporan	12 Laporan	322,559,886	12 Laporan	250,000,000	12 Laporan	250,000,000	12 Laporan	250,000,000	12 Laporan	250,000,000			
				2	10	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	12 Laporan	12 Laporan	95,032,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	60,000,000	12 Laporan	60,000,000			
				2	10	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan	12 Laporan	12 Laporan	67,320,000	12 Laporan	71,000,000	12 Laporan	71,201,040	12 Laporan	75,000,000	12 Laporan	75,000,000			
				2	10	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	12 Laporan	12 Laporan	302,500,000	12 Laporan	238,150,482	12 Laporan	275,000,000	12 Laporan	290,000,000	12 Laporan	290,000,000			
				2	10	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Laporan	12 Laporan	547,505,000	12 Laporan	330,000,000	12 Laporan	335,000,000	12 Laporan	350,000,000	12 Laporan	350,000,000			
				2	10	01	019	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	12 Laporan	12 Laporan	1,780,000,000	12 Laporan	1,400,000,000	12 Laporan	1,400,000,000	12 Laporan	1,400,000,000	12 Laporan	1,500,000,000			
				2	10	01	023	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan kantor	12 Laporan	12 Laporan	416,433,600	12 Laporan	420,000,000	12 Laporan	420,000,000	12 Laporan	420,000,000	12 Laporan	420,000,000			



Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Setelah Perubahan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Target
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				3,11	3,72	14,702,272,620	3,20	12,379,644,645	3,25	29,370,161,074	3,30	32,307,177,181	3,35	35,537,894,900	3,35	124,297,150,420	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bandung
				2103	Program Aplikasi Informatika	Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	NA	NA	12,834,356,200	NA	9,673,766,745	31,35	29,370,161,074	31,50	32,307,177,181.40	31,55	35,537,894,900	31,55	97,215,233,155	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bandung
						Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan	NA	NA		NA		22,40		22,50		22,60		22,60			
						Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	NA	NA		NA		4,50		4,60		4,70		4,70			



2	1	0	2.	0	Kegiatan	Jumlah Sub													
6	3	01	0	3	Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	NA	1 Sub Kegiatan	7.303.338.800	1 Sub Kegiatan	6.748.448.400	1 Sub Kegiatan	21.758.182.540	1 Sub Kegiatan	23.934.000.794	1 Sub Kegiatan	26.327.400.873	1 Sub Kegiatan	72.019.584.207
2	1	0	2.	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	- Jumlah lokasi dilengkapi wifi dan atau CCTV serta Jumlah interkoneksi antar Perangkat Daerah/Sekolah /puskemas	271 lokasi	530 lokasi	7.303.338.800	533 lokasi	6.748.448.400	540 lokasi	21.758.182.540	540 lokasi	23.934.000.794	540 lokasi	26.327.400.873	2.143 lokasi	72.019.584.207
2	1	0	2.	0	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	NA	7 Sub Kegiatan	5.531.017.400	7 Sub Kegiatan	2.925.318.345	7 Sub Kegiatan	7.611.978.534	7 Sub Kegiatan	8.373.176.387	7 Sub Kegiatan	9.210.494.026	7 Sub Kegiatan	25.195.648.948
2	1	0	2.	0	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	- Jumlah server yang terintegrasi di Pemerintah Kota Bandung	68 Lokasi	82 Lokasi	3.431.074.006	106 lokasi	502.357.707	88 Lokasi	2.033.907.500	34 Unit	2.237.298.250	34 Unit	2.461.028.075	344 Unit	6.732.233.825



				2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	- Jumlah laporan Perencanaan TIK	1 dokumen	1 dokumen	159.159.040	1 dokumen	82.691.500	2 dokumen	176.752.500	2 dokumen	194.427.750	2 dokumen	213.870.525	8 Dokumen	585.050.775		
				2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi elektronik	- Jumlah aplikasi yang diintegrasikan	5 Aplikasi	5 Aplikasi	673.674.225	5 Aplikasi	1.185.890.020	4 Aplikasi	300.550.000	4 Aplikasi	330.605.000	4 Aplikasi	363.665.500	22 Dokumen	994.820.500		
				2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Jumlah aplikasi yang dikelola dan pengelolaan Bandung Command Center	4 Aplikasi	4 Aplikasi	712.014.597	4 Aplikasi	266.915.500	5 Aplikasi	3.003.870.704	5 Aplikasi	3.304.257.774	5 Aplikasi	3.634.683.552	20 Aplikasi	9.942.812.030		
				2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	- jumlah laporan hasil pengendalian dan pengembangan infrastruktur publik	1 dokumen	1 dokumen	246.292.182	1 dokumen	690.640.118	6 Kegiatan	1.947.126.330	6 Kegiatan	2.141.838.963	6 Kegiatan	2.356.022.859	6 Kegiatan	6.444.988.152		
				2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	- Jumlah laporan hasil evaluasi TIK	1 dokumen	1 dokumen	155.168.850	2 dokumen	107.353.500	2 Dokumen	80.880.000	2 Dokumen	88.968.000	2 Dokumen	97.864.800	6 Dokumen	267.712.800		



				2	1	0	2	1	0	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	- Jumlah dokumen pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota Bandung	2 dokumen	1 dokumen	153.634.500	2 dokumen	89.470.000	2 Dokumen	68.891.500	2 Dokumen	75.780.650	2 Dokumen	83.358.715	9 Dokumen	228.030.865		
2		Meningkatnya Layanan Bandung Open data	Prosentase data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka									35%	35%	1.636.715.950	45%	540.001.500	55%	445.997.300	65%	490.597.030	75%	539.656.733	75%	3.652.968.513	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bandung
				2	2	0				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	NA	NA	1.636.715.950	NA	540.001.500	3,3	445.997.300	3,5	490.597.030.00	3,9	539.656.733	3,9	1.476.251.063	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bandung
				2	2	0	2			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Sub Kegiatan	1.636.715.950	3 Sub Kegiatan	540.001.500	3 Sub Kegiatan	445.997.300	3 Sub Kegiatan	490.597.030	3 Sub Kegiatan	539.656.733	3 Sub Kegiatan	1.476.251.063		
				2	2	0	2	0	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Jumlah publikasi data dan infografis	2 Dokumen	2 Dokumen	364.257.250	2 Dokumen	268.577.500	1 Dokumen	141.317.300	1 Dokumen	155.449.030	1 Dokumen	170.993.933	7 Dokumen	467.760.263		
				2	2	0	2	0	2	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	- Jumlah Data Terbuka Terstandar	3 Dokumen	3 Dokumen	360.072.200	2 Dokumen	156.730.000	1 Dokumen	203.120.000	1 Dokumen	223.432.000	1 Dokumen	245.775.200	8 Dokumen	672.327.200		



				2	2	0	2	0	0	6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	- Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	4 dokumen	4 dokumen	912.406.500	1 Dokumen	114.694.000	1 Dokumen	101.560.000	1 Dokumen	111.716.000	1 Dokumen	122.887.600	8 Dokumen	336.163.600		
3		Meningkatnya keamanan informasi persandian	Prosentase jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian										33,33%	46,87%	390.607,357	62,50%	96.730,258	78,12%	105.700,000	93,75%	116.270,000	100%	127.897,000	100%	837.204,615	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bandung
				2	2	0	2				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	NA	NA	390.607,357	NA	96.730,258	1,20	105.700,000	1,25	116.270,000.00	1,37	127.897,000	1,37	349.867,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bandung
				2	2	0	2	2	0	1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17 PD	1 Sub Kegiatan	390.607,357	1 Sub Kegiatan	96.730,258	1 Sub Kegiatan	105.700,000	1 Sub Kegiatan	116.270,000	1 Sub Kegiatan	127.897,000	1 Sub Kegiatan	349.867,000		
				2	2	0	2	2	0	1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah aplikasi yang diaudit keamanannya	17 PD	10 Aplikasi	390.607,357	10 Aplikasi	96.730,258	7 Aplikasi	105.700,000	7 Aplikasi	116.270,000	7 Aplikasi	127.897,000	41 Aplikasi	349.867,000		
4	Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat										73	76	5,122,464,079	79	2,901,202,874	82	18,168,455,963	85	19,985,301,559	88,31	21,983,831,715	88,31	68,161,256,191	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bandung



				2	1	0			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	NA	NA	2,794,498,420	NA	1,913,013,000	2	1,765,514,800	2,1	1,942,066,280.00	2,2	2,136,272,908	2,2	5,843,853,988	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bandung
										Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
										Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	NA	NA		NA		0,4		0,5		0,6		0,6			
										Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	NA	NA		NA		82		85		88,31		88,31			
				2	1	0	2	01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan pengelolaan dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	2,794,498,420	4 Sub Kegiatan	1,913,013,000	4 Sub Kegiatan	1,765,514,800	4 Sub Kegiatan	1,942,066,280	4 Sub Kegiatan	2,136,272,908	4 Sub Kegiatan	5,843,853,988		
				2	1	0	2	01	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Jumlah layanan penyuluhan dan pengendalian informasi	15 Dokumen	10 Dokumen	113,591,700	4 Dokumen	63,246,500	3 Dokumen	54,397,500	3 Dokumen	59,837,250	3 Dokumen	65,820,975	23 Dokumen	180,055,725		
				2	1	0	2	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Jumlah Studio Radio yang dikelola	2 unit	4 Dokumen	926,582,000	2 unit	671,720,100	2 Unit	622,022,100	2 Unit	684,224,310	2 Unit	752,646,741	2 Unt	2,058,893,151		
				2	1	0	2	01	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah layanan informasi publik	15 Dokumen	15 Dokumen	925,998,700	4 Dokumen	725,290,400	4 Dokumen	707,178,200	4 Dokumen	777,896,020	4 Dokumen	855,685,622	31 Dokumen	2,340,759,842		



				2	1	0	2	1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	- Jumlah sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat, Mitra dan Relawan	6 Dokumen	9 Dokumen	828.326.020	4 Dokumen	452.756.000	4 Dokumen	381.917.000	4 Dokumen	420.108.700	4 Dokumen	462.119.570	25 Dokumen	1.264.145.270		
				2	1	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi, Perkantoran	100%	NA	NA	100	55.550.000	100	16.402.941,163	100	18.043.235,279.30	100	19.847,558,807	100%	100%		
				2	1	0	2	0	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	NA	1 Sub Kegiatan	55.550.000	1 Sub Kegiatan	200.000,000	1 Sub Kegiatan	220.000,000	1 Sub Kegiatan	242.000,000	1 Sub Kegiatan	662.000,000		
				2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah layanan data/informasi Program/kegiatan Diskominfo	NA	NA	NA	2 Dokumen	55.550.000	2 Dokumen	200.000,000	2 Dokumen	220.000,000	2 Dokumen	242.000,000	8 Dokumen	662.000,000		
				2	1	0	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	14.899.013,029	1 Sub Kegiatan	12.239,722,772	1 Sub Kegiatan	13.234,792,073	1 Sub Kegiatan	14.558,271,280	1 Sub Kegiatan	16.014,098,408	1 Sub Kegiatan	43.807,161,762		
				2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Laporan Bulanan Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	14.899.013,029	12 Dokumen	12.239,722,772	12 laporan	13.234,792,073	12 laporan	14.558,271,280	12 laporan	16.014,098,408	60 Laporan	43.807,161,762		
				2	1	0	2		Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	NA	NA	NA	NA	1 Sub Kegiatan	84,562,500	1 Sub Kegiatan	93,018,750	1 Sub Kegiatan	102,320,625	1 Sub Kegiatan	279,901,875		



				2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	1 Paket	NA	NA	NA	NA	1 Paket	84,562,500	1 Paket	93,018,750	1 Paket	102,320,625	5 Paket	279,901,875		
				2	1	0	2	0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7 Sub Kegiatan	1,513,403,702	7 Sub Kegiatan	720,214,381	7 Sub Kegiatan	1,156,573,130	7 Sub Kegiatan	1,272,230,443	7 Sub Kegiatan	1,399,453,487	7 Sub Kegiatan	3,828,257,060		
				2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Laporan	12 Laporan	40.546.000	7 unit	85.800.000	12 laporan	153,938,290	12 laporan	169,332,119	12 laporan	186,265,331	60 Laporan	509,535,740		
				2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Laporan	12 Laporan	76.097.700	12 Laporan	58.321.200	12 laporan	65,748,300	12 laporan	72,323,130	12 laporan	79,555,443	60 Laporan	217,626,873		
				2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK dan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	12 Laporan	12 Laporan	297,670,000	12 Laporan	154,263,280	12 laporan	240,858,440	12 laporan	264,944,284	12 laporan	291,438,712	60 Laporan	797,241,436		
				2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Laporan	12 Laporan	309.796.500	12 Laporan	114.631.052	2 paket	247,387,960	2 paket	272,126,756	2 paket	299,339,432	10 paket	818,854,148		



				2	1	0	2.	0	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	50.884.250	12 Laporan	52.650.000	12 laporan	67.320.000	12 laporan	74.052.000	12 laporan	81.457.200	60 Laporan	222.829.200		
				2	1	0	2.	0	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tamu	12 Laporan	12 Laporan	240.964.545	12 Laporan	75.188.915	12 laporan	122.407.830	12 laporan	134.648.613	12 laporan	148.113.474	60 Laporan	405.169.917		
				2	1	0	2.	0	06	09	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Laporan	12 Laporan	497.444.707	12 Laporan	179.359.934	12 laporan	258.912.310	12 laporan	284.803.541	12 laporan	313.283.895	60 Laporan	856.999.746		
				2	1	0	2.	0	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	2 Sub Kegiatan	1,795,782,390	2 Sub Kegiatan	529,518,559	2 Sub Kegiatan	719,265,997	2 Sub Kegiatan	791,192,597	2 Sub Kegiatan	870,311,856	2 Sub Kegiatan	2,380,770,450		
				2	1	0	2.	0	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	72.568.390	12 Laporan	51.045.555	12 laporan	161.499.997	12 laporan	177.649.997	12 laporan	195.414.996	60 Laporan	534.564.990		
				2	1	0	2.	0	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	12 Laporan	1,723,214,000	12 Laporan	478.473.004	12 laporan	557.766,000	12 laporan	613.542,600	12 laporan	674.896,860	60 Laporan	1,846,205,460		



				2	1	0	2.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	3 Sub Kegiatan	886,695,987	3 Sub Kegiatan	924,199,834	3 Sub Kegiatan	1,092,309,963	3 Sub Kegiatan	1,201,540,959	3 Sub Kegiatan	1,321,695,055	3 Sub Kegiatan	3,615,545,978		
				2	1	0	2.	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa pemeliharaan dan Perijinannya	28 Unit	26 Unit	669.876.887	28 Unit	672.343.724	28 Unit	765.830.200	28 Unit	842.413.220	28 Unit	926.654.542	138 unit	2.534.897.962		
				2	1	0	2.	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit perbaikan peralatan kantor	12 Laporan	12 Laporan	72.849.100	175 unit	52.756.110	12 laporan	126.479.763	12 laporan	139.127.739	12 laporan	153.040.513	60 Laporan	418.648.016		
				2	1	0	2.	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 unit	2 Unit	143.970.000	1 unit	199.100.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	242.000.000	5 unit	662.000.000		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 6.3
Rekapitulasi Anggaran Rencana Program, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Sebelum Perubahan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Kondisi Kinerja
--	-------------------	-----------------	--	-----------------



Prioritas Pembangunan	Program (Outcome)	Awal RPJMD (tahun 0)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Pada Akhir Periode RPJMD
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Urusan Komunikasi dan Informatika													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4,777,966,721	100%	3,978,551,482	100%	4,087,272,090	100%	4,195,222,003	100%	4,298,118,378	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	300,876,949	90%	712,060,471	100%	731,518,721	100%	750,839,035	100%	769,254,894	100%
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	NA	-	-	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	300,000,000	100%	325,000,000	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	107,126,250	100%	89,202,652	100%	91,640,264	100%	94,060,597	100%	96,367,625	100%
Urusan Statistik													
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase data informasi yang berkualitas	35%	35%	1,763,826,465	45%	1,510,349,986	55%	1,551,622,839	65%	1,592,603,118	75%	1,631,664,957	75%
Urusan Persandian													
Program Optimalisasi Aplikasi	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	36%	36%	2,054,296,000	40%	1,793,854,592	45%	1,842,874,685	50%	1,891,547,285	55%	1,937,941,340	55%
Program Optimalisasi Persandian	Cakupan prosentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman	100%	100%	448,949,600	100%	415,468,919	100%	426,822,306	100%	438,095,211	100%	448,840,390	100%



Urusan Komunikasi dan Informatika															
Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi	100%	100%	12,290,734,328	100%	12,154,735,565	100%	12,468,715,820	100%	12,780,293,123	100%	13,076,113,986	100%		
Program Layanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat	100%	100%	972,760,000	100%	1,482,183,123	100%	1,522,686,269	100%	1,562,902,298	100%	1,601,235,664	100%		
Program Diseminasi Informasi	Cakupan layanan informasi masyarakat	60%	60%	2,010,886,124	70%	1,796,011,355	80%	1,845,090,385	90%	1,893,821,505	100%	1,940,271,339	100%		
Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang diimplementasikan	50%	50%	578,020,600	60%	589,559,654	70%	605,670,363	80%	621,666,867	90%	636,914,514	90%		
				25,305,443,037			24,771,977,800			25,448,913,742			26,121,051,042		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 6.4
Rekapitulasi Anggaran Rencana Program, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Setelah Perubahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir	



2	10	23	Program Diseminasi Informasi	Cakupan layanan informasi masyarakat	Persen	60	61.04	1,867,916,420									61.04	1,867,916,420	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	10	24	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang diimplementasikan	Persen	50	50	467,962,390										50	467,962,390	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	10	24	Program Perlindungan Sosial Bencana	Tersosialisasinya informasi covid melalui media dan Belanja Bandwidth	Bulan				5	1,053,151,000							5	1,053,151,000		
2	10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen				100	1,836,276,664							100	1,836,276,664	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Persen				100	337,656,110							100	337,656,110	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	10	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai					-	-							-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	10	08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Dinas	Persen				100	55,550,000							100	55,550,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	



2	10	19	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Interkoneksi Pengembangan Infrastruktur TIK yang Berfungsi	Persen				100	7,941,446,225						100	7,941,446,225	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	10	21	Program Layanan Informasi Publik	Meningkatnya Layanan Informasi melalui Media Kepada Masyarakat	Persen				100	671,720,100						100	671,720,100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	10	23	Program Diseminasi Informasi	Meningkatnya Layanan Informasi Masyarakat	Persen				70,13	1,241,292,900						70,13	1,241,292,900	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	10	24	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Dokumen Hasil Kajian yang digunakan dalam Rumusan Kebijakan yang Diimplementasikan	Persen				57,90	279,515,000						57,90	279,515,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen						100	16,402,941,163	100	18,043,235,279.30	100	19,847,558,807	100	54,293,735,250	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	Nilai				2	1,765,514,800	2,1	1,942,066,280.00	2,2	2,136,272,908	2,2	5,843,853,988	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	Persentase				100%		100%		100%		100%				
				Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	Nilai				0,4		0,5		0,6		0,6				



				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	Nilai					82		85		88,31		88,31		
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	Nilai					31,35	24,770,161,074	31,50	27,247,177,181,40	31,55	29,971,894,900	31,55	81,989,233,155	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evalueasi dan Pengembangan	Nilai					22,40		22,50		22,60		22,60		
				Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	Nilai					4,50		4,60		4,70		4,70		
2	20		STATISTIK															
2	14	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase data informasi yang berkualitas	Persen		38,16	1,636,735,950								38,16	1,636,735,950	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	14	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya Data Informasi yang Berkualitas	Persen				45,23		540,001,500					45,23	540,001,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Nilai					3,3	445,997,300	3,5	490,597,030,00	3,9	539,656,733	3,9	1,476,251,063	Dinas Komunikasi dan Informatika



2	21			PERSANDIAAN					1,776,296,179		3,014,120,778		105,700,000		116,270,000		127,897,000		5,140,283,957	
2	15	18		Program Optimalisasi Aplikasi	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Persen	36	36.65	1,385,688,822									36.65	1,385,688,822	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	15	19		Program Optimalisasi Persandian	Cakupan persentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman	Persen	100	100	390,607,357									100	390,607,357	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	15	18		Program Optimalisasi Aplikasi	Meningkatnya Aplikasi Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis e-Government	Persen				40,20		2,917,390,520						40,20	2,917,390,520	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	15	19		Program Optimalisasi Persandian	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Aplikasi yang Terkendali dan Aman	Persen				100		96,730,258						100	96,730,258	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	Nilai					1,20		105,700,000	1,25	116,270,000.00	1,37	127,897,000	1,37	837,204,615	Dinas Komunikasi dan Informatika
					JUMLAH				21,852,080,006		16,970,730,277		43,490,314,337		47,839,345,771		52,623,280,348		182,775,750,738	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



Keterangan :



: Tahun anggaran 2019

: Tahun anggaran 2020

: Tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Diskominfo Kota Bandung dengan Dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja Diskominfo Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Diskominfo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, Diskominfo berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			Tahun 0 (2018)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)	3,11	3,72	3,20	3,25	3,30	3,35	3,35
2.	Meningkatnya Layanan Bandung Open Data	Persentase data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	25%	35%	45%	55%	65%	75%	75%
3.	Meningkatnya Keamanan informasi persandian	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	33,33%	46,87%	62,50%	78,12%	93,75%	100%	100%
4	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	73	76	79	82	85	88,31	88,31



Sejalan dengan aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Program-program yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan sesuai dengan urusan dapat dilihat pada Tabel 7.2 sebagai berikut;

Tabel 7.2
Aspek dan Indikator Menurut Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah

No	Aspek	Bidang Urusan/indikator	Satuan	Baseline 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	ASPEK PELAYANAN UMUM	10. Komunikasi dan Informatika							
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	80	82.00	84.00	88.00	90.00	95.00
		Prosentase penduduk yang menggunakan HP/telephon	%	85,16	86.76	88.49	90.20	92.05	93.89



		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	94,27	94.46	94.65	94.84	95.03	95.22
		Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	26,99	25.59	24.19	22.79	21.39	20
2	ASPEK PELAYANAN UMUM	14. Statistik							
		Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Data Basis Pembangunan Daerah	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	ASPEK PELAYANAN UMUM	15 Persandian							
		Prosentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	%	33,33	46,87	62,50	78,12	93,75	100%



BAB VIII PENUTUP

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis. Seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Kota Bandung merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Dengan telah tersusunnya renstra ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung harus segera melakukan Peningkatan standard kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya; Pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK yang terintegrasi; Peningkatan pelayanan informasi melalui open data; Mendorong tim pengembangan smart city untuk lebih aktif dan Peningkatan layanan open data.

Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung juga dalam pelayanan kepada masyarakat harus memberikan; Peningkatan penyebaran interkoneksi dan wifi fasos/fasum; Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet dan jaringan; Peningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat, PPID dan media lainnya; Pemanfaatan layanan pengaduan Online LAPOR; Pemanfaatan BCC sebagai kebijakan pimpinan, karena Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan pintu gerbang Informasi



Pemerintah Kota Bandung dengan senantiasa menyediakan sarana dan prasarana informatika yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai dinas yang menjalin komunikasi timbak balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

Adanya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memacu kinerja aparat sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bandung, September 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

